

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendekatan arsitektur perilaku menekankan adanya hubungan timbal balik antara ruang dengan perilaku manusia sebagai penggunaannya. Menurut Haryadi et al., (2020), ruang dapat membentuk perilaku manusia, sekaligus mengalami pengaruh dari cara individu memahami, memanfaatkan, dan berinteraksi dengan ruang tersebut. Hubungan timbal balik ini menuntut sebuah ruang dirancang agar selaras dengan aktivitas penggunaannya. Sebagaimana Węziak Białowolska et al., (2018), lingkungan kerja yang tidak mampu memenuhi kebutuhan privasi dan kenyamanan pengguna berpotensi mengurangi produktivitas serta kepuasan kerja. Padahal, desain ruang yang berakar pada karakteristik penggunaannya terbukti mampu mendongkrak efisiensi, kesehatan mental, serta kualitas hubungan antarmanusia (Heerwagen et al., 2004). Atas dasar tersebut, pendekatan arsitektur perilaku menjadi sangat krusial untuk diaplikasikan guna memastikan fasilitas bangunan benar-benar akomodatif, responsif, dan berpihak pada kebutuhan manusiawi.

Pendekatan arsitektur perilaku terbukti aplikatif pada beragam konteks spasial, namun dominasinya masih berkuat pada area komersial, hunian, pendidikan, dan kawasan industri swasta. Kadeli (2018) mencontohkannya melalui perancangan fasilitas komunitas jalanan berbasis seni dan kewirausahaan untuk mengakomodasi kenyamanan mental dan jasmani. Di sektor permukiman, Suwandi (2021) mengevaluasi rancangan hunian vertikal dalam merespons tuntutan perilaku penghuni. Di lingkungan kerja kawasan industri, Prasetyo (2023) membuktikan bahwa aspek sirkulasi hingga tata suara krusial dalam menunjang efisiensi kerja. Khususnya dalam konteks lokal di Kota Lhokseumawe, pendekatan ini telah banyak menyentuh ruang publik. Tirta (2020) mengamati relasi penjual dan konsumen di area pasar komersial. Pada ranah pendidikan, Fakriah (2019) mengintegrasikan konsep ini untuk menciptakan lingkungan fisik sekolah ramah

anak, sementara Andriani (2022) menyoroti fenomena kepadatan (*crowding*) ruang dosen yang menyusutkan privasi. Merujuk pada deretan literatur tersebut, terlihat jelas bahwa penelitian arsitektur perilaku di Lhokseumawe masih sebatas pada tempat komersial dan pendidikan, sedangkan kajian yang meneliti ruang kerja di fasilitas publik khususnya pemerintahan belum ada sama sekali.

Oleh karena itu, riset ini hadir untuk menjembatani kekosongan literatur tersebut dengan memilih objek Kantor Wali Kota Lhokseumawe. Secara historis dan administratif, kota ini resmi berstatus otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001. Dalam menjalankan fungsinya, gedung ini tidak sekadar mewadahi aktivitas kerja harian Walikota beserta jajarannya, tetapi juga berperan vital sebagai fasilitas pelayanan publik yang esensial, wadah perumusan kebijakan strategis lintas sektoral, pusat layanan aspirasi warga, serta titik koordinasi dan pengawasan pembangunan yang menyeluruh guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kota Lhokseumawe. Temuan lapangan menunjukkan adanya kecenderungan aparatur dalam memodifikasi ruang kerja melalui penataan ulang perabot guna meningkatkan kenyamanan, sekaligus mengalihfungsikan beberapa area sebagai tempat penyimpanan barang pribadi dan lokasi interaksi informal yang tidak direncanakan. Realitas ini turut memperlihatkan kebiasaan duduk yang tidak kaku, penggunaan teknologi yang fleksibel, serta masalah tumpukan arsip akibat kurangnya fasilitas. Fenomena ini secara nyata membuktikan adanya kesenjangan (*friksi*) antara konsep awal tata ruang dengan realitas pemanfaatannya oleh aparatur pemerintahan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan kajian mengenai keterkaitan antara perilaku pengguna dan pemanfaatan ruang kerja pada instansi pemerintahan melalui studi kasus di Kantor Wali Kota Lhokseumawe. Kantor Wali Kota Lhokseumawe merupakan pusat penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi lokasi pelaksanaan fungsi administrasi, koordinasi, perumusan kebijakan, pelayanan publik, serta pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di Kota Lhokseumawe. Secara administratif, Kota Lhokseumawe memperoleh status sebagai daerah otonom

berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001. Gedung Kantor Wali Kota Lhokseumawe terdiri atas tiga lantai yang mengakomodasi berbagai perangkat organisasi daerah beserta unit kerja pendukung pemerintahan. Dalam penelitian ini, ruang lingkup observasi dibatasi pada lantai 1, dengan fokus pengamatan pada tiga ruang kerja, yaitu Bagian Umum, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, serta Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, ditemukan bahwa aparatur melakukan berbagai bentuk penyesuaian terhadap lingkungan kerja sebagai respons atas kebutuhan aktivitas sehari-hari. Penyesuaian tersebut meliputi perubahan tata letak meja dan kursi untuk meningkatkan kenyamanan dan efektivitas kerja, pemanfaatan sebagian ruang sebagai area penyimpanan dokumen maupun barang pribadi, serta terbentuknya titik-titik interaksi informal yang tidak direncanakan dalam rancangan awal. Selain itu, pola penggunaan ruang menunjukkan fleksibilitas dalam posisi bekerja, pemanfaatan teknologi yang berpindah-pindah sesuai kebutuhan, serta penumpukan arsip akibat keterbatasan kapasitas penyimpanan. Berbagai kondisi tersebut mengindikasikan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara konsep perancangan ruang dengan pola pemanfaatan aktual oleh pengguna.

1.2. Rumusan Masalah

Mengingat kajian arsitektur perilaku di Kota Lhokseumawe selama ini masih terpusat pada ruang publik komersial dan fasilitas pendidikan, hingga saat ini belum ada penelitian serupa yang menyoroti dinamika tata ruang di ranah pemerintahan. Untuk menjembatani kekosongan literatur tersebut, penelitian ini menjadikan Kantor Wali Kota Lhokseumawe sebagai objek studi kasus guna mengkaji pembentukan perilaku pengguna ruang di lingkungan kerja institusi birokrasi, pola interaksi, Pendekatan arsitektur perilaku secara khusus diterapkan untuk menganalisis sejauh mana kondisi fisik ruang memengaruhi aktivitas serta adaptasi para pegawai dalam menjalankan tugas operasional sehari-hari. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah utama dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana penerapan prinsip arsitektur perilaku

memengaruhi pola pemanfaatan ruang dan aktivitas pengguna di lingkungan kerja Kantor Wali Kota Lhokseumawe.

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam upaya mewujudkan lingkungan kerja yang efektif dan efisien, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antara desain ruang arsitektural dengan perilaku serta aktivitas pengguna, khususnya dalam lingkungan kerja pemerintahan. Penelitian ini mengambil Kantor Wali Kota Lhokseumawe sebagai studi kasus untuk mengkaji pengaruh tata ruang terhadap interaksi sosial, tingkat kenyamanan kerja, dan efektivitas pelaksanaan tugas pegawai. Dengan menggunakan pendekatan arsitektur perilaku, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara pola penataan ruang dan perilaku pengguna dalam ruang kerja, sekaligus merumuskan rekomendasi desain yang lebih responsif terhadap kebutuhan penggunanya. Oleh karena itu, fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi bagaimana aspek-aspek arsitektur perilaku memengaruhi pola pemanfaatan ruang dan aktivitas pegawai di Kantor Wali Kota Lhokseumawe.

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan kontribusi yang bernilai, baik secara teoretis maupun praktis, dalam memperkaya pemahaman mengenai hubungan antara arsitektur perilaku dan pola penataan ruang pada lingkungan perkantoran pemerintahan, khususnya di Kantor Wali Kota Lhokseumawe. Dengan menganalisis perilaku pengguna beserta interaksinya terhadap ruang kerja, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan wawasan yang dapat mendukung perancangan ruang yang lebih selaras dengan kebutuhan, karakteristik, dan aktivitas penggunanya. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keterkaitan antara penataan ruang dan perilaku pengguna di lingkungan kantor pemerintahan.
2. Mendorong kesadaran akan pentingnya desain ruang kerja yang mempertimbangkan aspek perilaku, kenyamanan, dan kebutuhan pengguna.

3. Menjadi referensi dalam pengembangan lingkungan kerja yang lebih adaptif serta sesuai dengan karakteristik aktivitas dan pola kerja pegawai.
4. Menyediakan rekomendasi desain yang dapat mendukung peningkatan produktivitas dan kinerja pegawai, sekaligus berkontribusi dalam mengurangi tingkat stres serta menjaga kesehatan dan kesejahteraan di lingkungan kerja.

1.5. Batasan dan Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menjaga agar pembahasan tetap terfokus dan tidak meluas ke luar permasalahan yang diteliti, penelitian ini menetapkan batasan ruang lingkup yang jelas sehingga proses pelaksanaannya dapat berlangsung secara sistematis dan terarah. Penelitian berfokus pada Kantor Wali Kota Lhokseumawe sebagai objek kajian dengan menitikberatkan pada analisis arsitektur perilaku dalam kaitannya dengan pola penataan ruang dan aktivitas para penggunanya. Pembahasan tidak mencakup keseluruhan aspek perancangan bangunan, tetapi dibatasi pada kajian mengenai hubungan antara perilaku pengguna ruang kerja dengan tata letak serta konfigurasi ruang, khususnya pada beberapa unit kerja yang dipilih sebagai sampel penelitian.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alur pembahasan dan struktur isi penelitian. Adapun susunan sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Bab I: Pendahuluan

Bab ini menguraikan pokok-pokok permasalahan yang menjadi dasar penelitian, meliputi latar belakang, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, serta kerangka alur yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan penelitian.

2) Bab II: Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori

Bab ini memuat kajian pustaka yang menguraikan teori-teori dasar dan konsep-konsep yang relevan dengan topik penelitian. Teori-teori tersebut

digunakan sebagai landasan konseptual dan acuan dalam melakukan analisis serta pembahasan pada bab-bab selanjutnya.

3) Bab III: Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan metodologi yang digunakan dalam penelitian, meliputi lokasi penelitian, pendekatan dan metode penelitian, objek dan subjek penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, instrumen yang digunakan, teknik pengumpulan data, metode analisis data, serta kerangka metode penelitian yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan studi.

4) Bab IV: Hasil dan Pembahasan

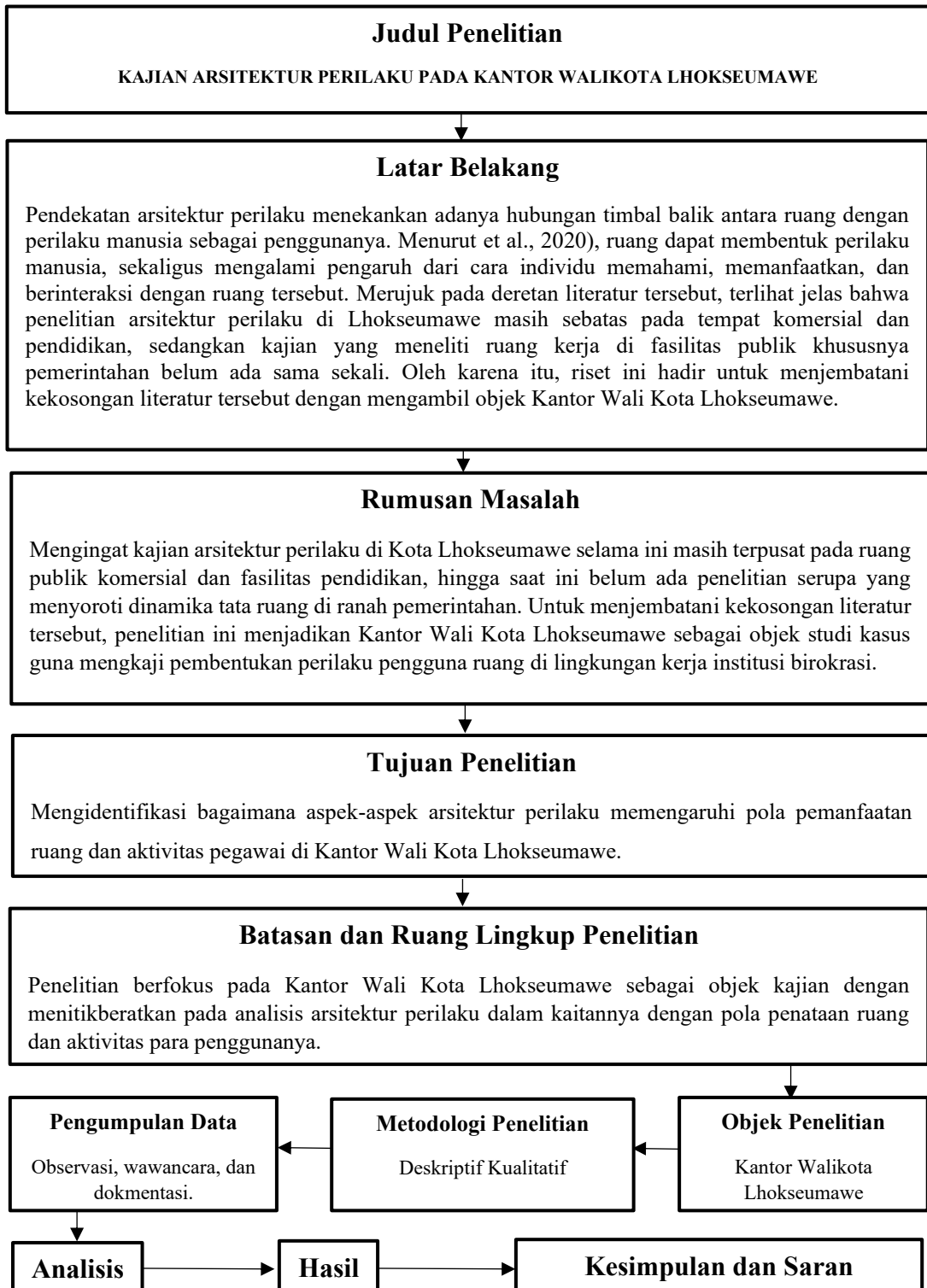
Bab ini menguraikan objek penelitian, proses analisis data, pembahasan, serta hasil penelitian yang diperoleh. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk deskripsi dan analisis data. Deskripsi data memberikan gambaran mengenai informasi yang diperoleh dari proses pengumpulan data, sedangkan analisis data bertujuan untuk menafsirkan dan menjelaskan temuan penelitian. Selanjutnya, pembahasan mengaitkan hasil analisis dengan tujuan penelitian serta landasan teori dan kajian pustaka yang telah diuraikan pada bab sebelumnya sehingga diperoleh kesimpulan yang komprehensif.

5) Bab V: Penutup

Bab ini merupakan bagian penutup dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Selain itu, dijelaskan pula implikasi penelitian terhadap pengembangan teori maupun penerapannya dalam praktik. Pada bagian akhir, disajikan daftar pustaka yang memuat seluruh sumber referensi yang digunakan dalam penelitian sesuai dengan pedoman atau gaya sitasi yang telah ditetapkan.

1.7. Kerangka Alur Pikir Penelitian

Adapun kerangka alur pikir penelitian sebagai berikut:



Gambar 2. 1. Diagram Kerangka Alur Pikir Penelitian (Penulis, 2026)